

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692077/2026**

**Revisi ke 01**  
Tanggal : 27 Desember 2025

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

**B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |   |                   |  |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (135)             | KEMENTERIAN HUKUM  |
| 2. Unit Organisasi            | : | (04)              | DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  |
| 3. Provinsi                   | : | (34)              | SULAWESI BARAT   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : | (692077)          | KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT  |
| Sebesar                       | : | Rp. 1.289.098.000 | ( SATU MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.289.098.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	1.289.098.000

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

- |                               |     |               |                                |     |   |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni               | Rp. | 0             | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB                        | Rp. |               | - Pinjaman Dalam Negeri        | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan             | Rp. | 1.289.098.000 | - Hibah Dalam Negeri           | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0             | 5. Hibah Langsung              | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri        | Rp. | 0             | - Hibah Luar Negeri Langsung   | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri           | Rp. | 0             | - Hibah Dalam Negeri Langsung  | Rp. | 0 |
|                               |     |               | 6. SBSN PBS                    | Rp. | 0 |

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                |           |               |
|----------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN MAMUJU | (178) Rp. | 1.289.098.000 |
|----------------|-----------|---------------|

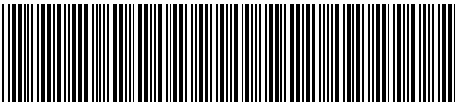
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
LUKY ALFIRMAN  
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026  
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7230-0218-9703-9189

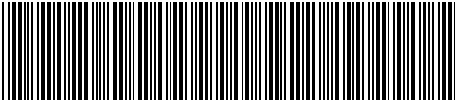
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

										Halaman : I A. 1	
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							1.289.098.000	
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							1.289.098.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:										
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya					4,00	layanan	730.391.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah					4,00	layanan	730.391.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga					1,00	Perkara	11.450.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah					1,00	Perkara	11.450.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga					4,00	Lembaga	511.515.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah					4,00	Lembaga	511.515.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					1,00	Laporan, Layanan	35.742.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah					1,00	Laporan	35.742.000

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026  
I B. SUMBER DANA



DS:7230-0218-9703-9189

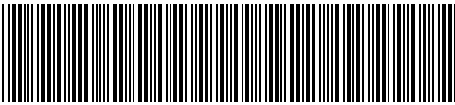
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.289.098.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN



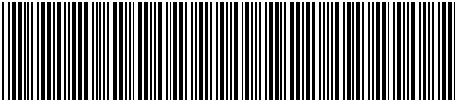
DS:7230-0218-9703-9189

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692077	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT	-	1.289.098	-	-	-	1.289.098	34 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.289.098	-	-	-	1.289.098		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.289.098	-	-	-	1.289.098		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	730.391	-	-	-	730.391		
04	PNBP	-	730.391	-	-	-	730.391		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	11.450	-	-	-	11.450		
04	PNBP	-	11.450	-	-	-	11.450		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	511.515	-	-	-	511.515		
04	PNBP	-	511.515	-	-	-	511.515		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	35.742	-	-	-	35.742	34 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026  
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7230-0218-9703-9189

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode/Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT  
Kewenangan : (KD)

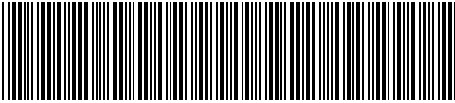
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
04	PNBP	-	35.742	-	-	-	35.742	178@	
JUMLAH		-	1.289.098	-	-	-	1.289.098		

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7230-0218-9703-9189

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT  
Kode>Nama Satker : (692077) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

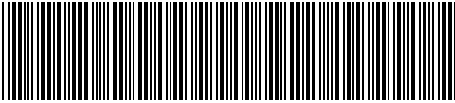
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692077	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	80.189	117.369	154.283	138.238	152.541	121.865	175.138	153.340	79.066	51.653	65.416	1.289.098
		BELANJA BARANG	0	80.189	117.369	154.283	138.238	152.541	121.865	175.138	153.340	79.066	51.653	65.416	1.289.098
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	80.189	117.369	154.283	138.238	152.541	121.865	175.138	153.340	79.066	51.653	65.416	1.289.098
	135.04.BF.7110	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	80.189	117.369	154.283	138.238	152.541	121.865	175.138	153.340	79.066	51.653	65.416	1.289.098

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026  
IV A. B L O K I R



DS:7230-0218-9703-9189

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [692077] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692077	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 520.375	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 520.375	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.260
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.978		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.354
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.725		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.254
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.850	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.260	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.990
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.443	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	521211	Belanja Bahan(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.594
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.931	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026  
IV A. B L O K I R



Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [692077] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

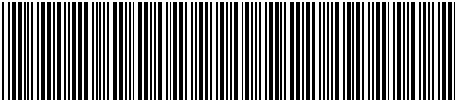
KODE	URAIAN		KODE	URAIAN					
7110.FAE	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
		Tidak Dapat Dicairkan		Rp.	177.500	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden					Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	210
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya							
	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
		Tidak Dapat Dicairkan		Rp.	1.080				
		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden							
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya							
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)							
		Tidak Dapat Dicairkan		Rp.	25.513				
		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden							
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya							
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)							
		Tidak Dapat Dicairkan		Rp.	1.786				
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)								
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	21.065						
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan									
521211	Belanja Bahan(PNBP)								
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	856						
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden								
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)								
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	11.701						
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden								

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692077/2026  
IV B. C A T A T A N



DS:7230-0218-9703-9189

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [692077] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.  
WIDODO